

PENYEDIA JASA SIAP BERTANGGUNG JAWAB

Perbaiki Pelataran Tugu Jadi Prioritas

YOGYA (KR) - Perbaikan pelataran kawasan Tugu yang mengalami kerusakan menjadi prioritas usai menjadi sorotan. Meski sebelumnya beberapa titik diperbaiki, Jumat (5/2) kemarin sejumlah pekerja mulai fokus memperbaiki bagian mainhole atau penutup saluran yang mengalami pecah.

Pimpinan PT Sari Gunung Mataram Sakti, Nanang Sukrisno, selaku pihak penyedia jasa mengaku siap bertanggung jawab karena masih menjadi kewajibannya. "Masa perawatan enam bulan masih menjadi kewajiban kami. Misalkan nanti setelah enam bulan masih ada yang rusak, kami juga siap memperbaiki demi Yogya," akunya saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (5/2).

Menurutnya, bahan baku sudah disesuaikan dengan spesifikasi. Hanya keterbatasan waktu dalam proses teknis pembangunan menjadi

hambatan tersendiri. Dicontohkannya usia beton yang melapisi pelataran seharusnya mencapai 14 hari, akan tetapi karena kondisi traffic lalu lintas maka dalam waktu tujuh hari sudah dilalui kendaraan. Akibatnya, batuan andesit yang tersusun rapi dalam perjalanannya menjadi kurang presisi.

Sementara pecahnya salah satu mainhole karena persoalan pada bagian pendukung. Sehingga ketika dilalui kendaraan secara berulang-ulang maka terjadi guncangan hingga meretakkan bagian mainhole.

"Penutupnya akan kita ganti baru. Sudah kita pesankan. Kendala dulu itu karena usia beton belum matang. Pekerjaannya juga harus dibagi beberapa segmen karena lalu lintasnya tidak boleh ditutup," jelas Nanang.

Sementara itu anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yoga Baharudin, mengaku bentuk tanggung jawab atau iktikad baik pihak penyedia perlu diapresiasi. Akan tetapi keselamatan pengguna jalan yang melintasi Tugu juga perlu diprioritaskan. Sembari menunggu produksi mainhole yang membutuhkan waktu sebulan, maka pengelasan mainhole yang rusak harus dijamin kekuatannya. Jangan sampai justru kembali rusak karena lalu lintas di Tugu cukup padat. "Pengawasan pekerjaan dari pihak eksekutif dan legislatif juga perlu dilakukan," katanya. (Dhi)-f



Pekerja dari pihak penyedia jasa melakukan perbaikan mainhole di kawasan Tugu, Jumat (5/2). KR-Istimewa

DISDIKPORA MULAI KAJI SKEMA PPDB

UN Kembali Dihapus, Kelulusan Ditentukan Sekolah

YOGYA (KR) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI kembali menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun ajaran kali ini. Dengan begitu kelulusan siswa tetap menjadi kewenangan pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yoga Budi Santoso Asrori, mengungkapkan tahun 2020 lalu pelaksanaan UN juga ditiadakan akibat pandemi. "Terkait kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sama seperti tahun 2020 kemarin," jelasnya, Jumat (5/2).

Pada tahun lalu Disdikpora Kota Yoga menyelenggarakan ujian akhir secara daring, sedangkan tahun ini pun masih dikaji. Budi mengaku, pihaknya justru masih melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran daring yang sudah berjalan satu tahun belakangan. Terutama menyangkut metode yang dilakukan pihak sekolah serta capaian target kurikulum. "Kita masih belum tahu sampai kapan pembelajaran daring akan berjalan. Sehingga efektivitas metode yang digunakan justru paling penting untuk saat ini. Harapannya meski belajarnya tidak saling tatap muka namun materinya bisa tetap sampai ke anak didik," urainya.

Di samping itu, peniadaan UN juga bisa berdampak pada skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Meski demikian, Budi menilai peniadaan UN dengan PPDB merupakan dua hal yang berbeda. Akan tetapi pihaknya juga sudah mulai mengkaji skema PPDB tahun ajaran 2021/2022. Salah satu upayanya ialah menjalin koordinasi yang sinergis dengan Disdikpora DIY dan kabupaten lain. Hal ini karena PPDB harus menggunakan parameter terukur, spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga parameter di tiap daerah seharusnya ada kesamaan. "Skema PPDB masih nanti namun sudah kita mulai kaji. Harapannya nanti ada parameter yang terukur. Apalagi jarak wilayah seperti kota, Bantul dan Sleman relatif tidak ada perbatasan yang ekstrem," katanya. (Dhi)-f

PERTIMBANGKAN PENANGANAN COVID-19

Masa Bakti RT dan RW Diperpanjang 6 Bulan

YOGYA (KR) - Masa bakti pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) periode 2018-2021 yang sedianya berakhir 31 Maret, diperpanjang enam bulan. Status perpanjangan tersebut sudah dituangkan melalui Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2021. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yoga Budi Santoso, mengungkapkan perpanjangan kepengurusan tersebut ditetapkan sampai 30 September 2021. "Dengan adanya perpanjangan kepengurusan maka proses pemilihan juga turut diundur," tandasnya, Jumat (5/2).

belum masuk kepengurusan baru biasanya dilakukan pemilihan secara serentak di wilayah. Sementara kondisi saat ini belum dimungkinkan ada pemilihan guna menghindari kerumunan. "Setelah masa perpanjangan nanti, satu bulan sebelumnya bisa dilakukan pemilihan dan penetapan. Semoga ke depan pandemi sudah dapat terkendali dengan baik," imbuhnya. Selama masa perpanjangan, pengurus RT maupun RW juga berhak atas honorarium yang dua tahun ini diberikan oleh Pemkot. Honorarium bagi pelayanan masyarakat sudah diatur dalam Perwal 72/2019 baik menyangkut jumlah serta teknis pemberian. Ketua RT berhak atas honor Rp 250.000 tiap tiga bulan dan Ketua RW Rp 300.000 per tiga bulan. Hanya pencairannya diberikan dua kali dalam setahun. Di Kota Yoga total terdapat 617 RW dan 2.535 RT. Instruksi Walikota 1/2021 itu pun harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan lurah paling lambat pada 11 Februari 2021. (Dhi)-f

Jangan Ada Lagi Monopoli Penyiaran



Suasana FGD di Studio RRI Yogyakarta. KR-Febriyanto

YOGYA (KR) - Lahirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tidak langsung berimplikasi pada upaya melanggengkan sistem monopoli penyiaran di Indonesia seperti yang sudah ada selama ini. Salah satu indikasi kuat terkait dengan legitimasi multiplexing siaran televisi digital yang tidak hanya dikelola TVRI sebagai LPP, tapi juga lembaga penyiaran swasta. "Bisa dikatakan sebagai tragedi nasional. Belum lagi jika bicara tentang konten lokal yang makin tergerus karena hanya dialokasikan 10 persen dari seluruh jam siaran serta kurang memberi ruang keterlibatan Pemda dan masyarakat," tegas Pengamat Penyiaran Publik Darmanto, dalam FGD Menyikapi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Postelsiar

UU No 11 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Lembaga Penyiaran Publik yang dilaksanakan di Studio RRI Pro 1 Yogyakarta, Jumat (5/2). Turut menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan secara online dipandu moderator Puji Riyanto tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid, Ketua Pansus UU Penyiaran 2002 Paulus Widiyanto, Dewan Pengawas LPP RRI Hasto Kuncoro serta Pakar Hukum Usahid sekaligus pemerhati media massa Hari Wiryawan. Kegiatan yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting tersebut juga diikuti angkasawan RRI di seluruh Indonesia. Dikatakan Darmanto, pembahasan UU Ciptaker maupun RPP Postelsiar yang cenderung tertutup serta tidak membuka peluang luas bagi

partisipasi publik juga sangat disesalkan. Hal itulah yang dinilai cenderung melanggengkan monopoli penyiaran di Indonesia. Sementara Meutia Hafid menjelaskan, UU Ciptaker Klaster Penyiaran yang dilanjutkan dengan turunan RPP Postelsiar membawa perubahan penting dalam mendukung program transformasi digital nasional. Pasalnya hal tersebut mampu menghasilkan efisiensi infrastruktur dan frekuensi. "Seperti diketahui migrasi Indonesia untuk televisi digital sudah tertinggal. Kesepakatan internasional terkait ASO sudah sangat lama paling lambat tahun 2015. Sedangkan untuk ASEAN tahun 2020," katanya. Sedang mengomentari RPP Postelsiar, pihaknya menyebut sudah seharusnya dapat sinkron dengan UU Ciptaker. Meski pihaknya juga mengakui RPP Postelsiar belum sepenuhnya mampu mengakomodir kepentingan RRI sebagai LPP. Selain itu, Meutia juga menjelaskan revisi RUU Penyiaran diharapkan dapat masuk Prolegnas dan dibahas tahun 2021 ini. Salah satu yang menjadi penekanan, pentingnya penguatan lembaga KPI sebagai representasi peran publik di dunia penyiaran. Paulus Widiyanto menyebut jika UU Ciptaker membalik arus. Memperkuat pemerintah sebagai regulator, tapi justru mengurangi peranan KPI sebagai wakil kepentingan publik. (Feb)-f

RELAKSASI KREDIT

Organda Berharap Kebijakan Khusus

YOGYA (KR) - Ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, menjelang Maret 2021 yang merupakan batas relaksasi kredit pertama pengusaha angkutan darat dan pariwisata berharap masih ada relaksasi kedua. Sebab, sampai saat ini kendaraan yang dibeli dengan kredit di bank belum bisa beroperasi untuk melunasi/mengangsur utang di bank. "Beberapa waktu yang lalu saya mewakili Organda sudah menghadap pimpinan OJK Yoga. Ada program relaksasi tahun 2021, tapi skemanya nanti dari masing-masing bank atau leasing," tutur Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY Hantoro kepada KR, Jumat (5/2) di kantornya GeGe Transport. Hantoro berharap, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bisa memberikan keringanan PKB (pajak kendaraan bermotor) untuk plat kuning. "Karena kami hampir satu tahun tidak bisa bergerak," jelasnya. Hantoro juga mohon pemerintah turut serta mengkampanyekan wisata sehat, terencana, tertata dan terpantau dengan menggunakan jasa pelayanan angkutan pariwisata. "Karena dengan angkutan pariwisata bisa menggerakkan kegiatan para pelaku yaitu biro perjalanan, tour leader, hotel, rumah makan, destinasi dan pusat oleh-oleh," ujarnya.



Hantoro KR-Juvintarto

Hantoro menyebutkan dari jumlah driver dan co driver se DIY saat ini ada sekitar 5.500 orang di luar mekanik dan tenaga kantor. "Dari 5.500 tadi seluruhnya adalah laki-laki, dan sebagai kepala rumah tangga. Jika jumlah itu kita kalikan 3 (anak dan istri) total ada 16.500 jiwa yang bisa dipastikan 'sakit' karena tidak punya penghasilan," ujarnya. Organda DIY, lanjut Hantoro sudah mencoba inovasi-inovasi untuk menarik wisatawan lokal. "Tapi karena kebijakan yang sangat menatkan dan memberatkan bagi wisatawan, pariwisata menjadi tak menentu," keluhnya. Senada, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardianto Setyo Ajie menyebutkan, tanggal 9 Februari rencana beraudiensi dengan Gubernur DIY. "Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan ke Pak Sekda mengenai kondisi jatuh tempo (pembayaran kredit) teman-teman industri yang sudah harus membayar kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan. Sedangkan kemampuan membayar belum ada sampai saat ini," ujarnya. Bobby berharap relaksasi ke-2 bisa menjadi kebijakan lokal Pemda DIY dalam upaya mempertahankan kelangsungan usaha industri pariwisata. (R-4)-f

Matahari Jaya SUPERMARKET BANGUNAN
JAM OPERASIONAL 08.00-20.00 WIB BUKA SETIAP HARI
PROMO CUAN
PAKET HOKI HAMAR MANDI Rp 1.140.000
CEK HARGA DULU BARU BELI!
PERIODE PROMO HINGGA 28 FEB 2021
TEBAR ANPAU DISKON SEMUA HOKI!
HARGA HOKI SEMUA SERBA 88
#AYO BELANJA HOKI
Gratis Ongkir 0852 2076 8889

DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP PERTAMA KREDITUR H. FUAD (Dalam Paillit)

Berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 201 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 20/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg.Jo.No.24/Pdt.Sus.Pkpu/2018/PN.Smg tertanggal 04 Februari 2021, dengan ini Tim Kurator H.Fuad (dalam Paillit) mengumumkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Harta Paillit/Boedel Paillit H.Fuad (dalam Paillit) sebagai berikut

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	TAGIHAN YG DIKULI (Rupiah)	JUMLAH PENERIMAAN (Rupiah)	JUMLAH PEMBAGIAN (Rupiah)
A	PENERIMAAN				
1	Lelang Tahap Pertama di KPNL Yogyakarta,	SHM.1631		2.100.000.000,00	
B	PENGELUARAN				
1	Biaya Kepailitan			-	264.301.570,00
2	Biaya Lelang			-	34.500.000,00
3	Cadangan Fee Kurator			-	157.500.000,00
4	Cadangan Fee Pengurus			-	656.000.000,00
C	PEMBAGIAN				
1	PT. Bank Jateng	Separatis	725.463.995,00		725.463.995,00
2	PT. BNI Tbk	Konkuren	1.040.788.627,00		31.343.568,54
3	PT. Bank Mandiri Tbk	Konkuren	125.000.000,00		3.764.401,32
4	PT. Bank CIMB Niaga	Konkuren	251.000.000,00		7.558.917,82
5	PT BPR Gajah Mungkur	Konkuren	550.000.000,00		16.563.365,75
6	KSP Kusuma Artha	Konkuren	2.949.707.389,00		88.831.058,80
7	Jag. Kurniawan Hallim	Konkuren	1.698.862.500,00		51.161.602,72
8	Kantor Advokat Themis	Konkuren	100.000.000,00		3.011.521,05
	JUMLAH		7.440.822.511,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00

Bahwa Daftar Pembagian ini telah pula disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Tenggang waktu selama 5 (lima) hari kalender Kreditur dapat mengajukan keberatan.

Horat Kami,
Tim Kurator H. Fuad (dalam Paillit)

MUHAMMAD SAEFUDIN,S.H.,M.Hum RONALD ANTHONY SIRAIT,S.H.

1500024 Halo UT
PTN Pelopor Pembelajaran Jarak Jauh
Ayo bergabung bersama UT
Penerimaan Mahasiswa Baru s.d. 10 Februari 2021
Fakultas Ekonomi
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendaftaran Online: sia.ut.ac.id
www.ut.ac.id
Universitas Terbuka Yogyakarta
Jl. Bantul No. 81 - Yogyakarta, Telp. 0274-411463/411464
Email: ut-yogyakarta@campus.ut.ac.id
www.yogyakarta.ut.ac.id [f ut.yogyakarta](https://www.facebook.com/ut.yogyakarta) [ut.yogyakarta](https://www.instagram.com/ut.yogyakarta) 0819 0398 3818